

LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF
RoundTable Discussion

Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Round Table Discussion bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang diselenggarakan di Bandung, 22 Januari 2026 dapat terlaksana dengan lancar serta menghasilkan berbagai pemikiran strategis. Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah terlaksana.

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya membangun ruang dialog publik yang konstruktif dalam merespons pembentukan dan peran Danantara sebagai superholding BUMN serta implikasinya terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi dan peneliti, pelaku usaha, pemerintah daerah, perwakilan BUMN, hingga masyarakat sipil untuk membahas secara terbuka tantangan, peluang, dan arah kebijakan yang diperlukan agar transformasi BUMN dapat berjalan sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah.

Provinsi Jawa Barat, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta perannya sebagai pusat industri, manufaktur, dan investasi, memiliki kepentingan strategis terhadap arah kebijakan investasi Danantara. Melalui diskusi ini, berbagai perspektif dari daerah mengemuka, termasuk terkait potensi konsolidasi aset BUMN, iklim investasi regional, risiko sentralisasi ekonomi, serta peluang kolaborasi antara Danantara dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seluruh pandangan tersebut dihimpun sebagai bahan refleksi dan masukan penting bagi perumusan kebijakan nasional yang lebih adaptif dan berpihak pada penguatan ekonomi daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh narasumber, peserta, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan publik yang membutuhkan rujukan terkait perkembangan reformasi BUMN dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. Kami berharap dialog seperti ini dapat terus diperluas dan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Bandung, Januari 2026

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	4
1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan	5
1.4 Peserta Kegiatan.....	5
1.5 Susunan Acara	6
1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB II LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN.....	7
2.1 Konteks dan Tujuan Strategis.....	7
2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka	8
2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting.....	12
2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah	16
2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi	19
2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat.....	23
2.7 Kesimpulan.....	25
BAB III DOKUMENTASI KEGIATAN	28
3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	28
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Acara	6
Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	6
Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	28



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama "Daya Anagata Nusantara" diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorotan publik belakangan ini banyak mengarah kepada beleid yang ditujukan untuk memperbaiki penatalaksanaan Danantara, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beleid anyar tersebut mengatur pemisahan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan semua BUMN dari keuangan negara. Sebagian kalangan akademisi

menilai, kebijakan ini bisa membuka celah baru bagi penyelewengan dana publik. Celah tersebut dinilai dapat menciptakan "zona abu-abu" yang menumpulkan pengawasan dan pengendalian aset negara di BUMN yang selama ini masuk dalam kategori "kekayaan negara yang dipisahkan". Implikasi lain dari pengecualian tersebut adalah keuntungan atau kerugian investasi Danantara tidak secara otomatis dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. Padahal, dalam beleid terbaru, BPI Danantara punya kewenangan "super" untuk mengelola dividen BUMN, memberikan persetujuan penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, hingga merestui penghapusan buku atau hapus tagih atas aset BUMN.

Dengan mandat BPI Danantara yang semakin luas, ruang fiskal memang masih ada potensi tertekan karena kas negara masih akan terbebani tugas menyalurkan PMN untuk BUMN dan BPI Danantara. Belum lagi hasil dividen yang selama ini masuk ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi berkurang atau bahkan dividen dialokasikan semua ke pengelolaan BPI Danantara.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada PMN tunai adalah membuka keran pendanaan alternatif. BPI Danantara kini tengah merumuskan berbagai opsi agar perusahaan pelat merah tidak terus menerus bergantung pada kas negara. Namun, perlu diingat bahwa tak semua opsi bebas risiko. Beberapa skema pendanaan alternatif justru bisa menjadi beban baru jika tak dikelola dengan hati-hati. Karena itu, variasi sumber pendanaan di luar APBN dipandang penting untuk menahan penumpukan beban fiskal.

Bagi BPI Danantara sendiri, tantangannya justru berlapis. Sebagai lembaga investasi yang baru berdiri, BPI Danantara dituntut untuk menyalurkan modal secara tepat sasaran, menghindari penyelewengan, sekaligus memastikan BUMN tidak terlena dengan kemudahan akses dana. Berbagai macam risiko akan dihadapi BPI Danantara, mulai dari kegagalan/kerugian bisnis/investasi, fraud keuangan, dan tekanan dari kepentingan pihak tertentu. Selain itu juga adanya risiko operasional berupa utang jangka pendek, fluktuasi nilai tukar, dan beban bunga yang membengkak. Begitu juga dengan risiko tuntutan hukum dari mitra bisnis/investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Menanggapi berbagai permasalahan risiko tersebut, BPI Danantara memerlukan upaya tata kelola yang fundamental untuk dapat mempercepat transformasi BUMN yang benar benar didambakan oleh pemerintah. Transformasi BUMN bukan hanya sekedar jargon saja namun sebuah keniscayaan agar dapat melaksanakan mandat baru dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia.

Berangkat dari berbagai kondisi, tantangan dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, diperlukan ruang dialog yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan dan perspektif, mengidentifikasi permasalahan lebih mendalam, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif bagi BPI Danantara. Atas dasar tersebut, Nagara Institute menyelenggarakan kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) sebagai forum strategis untuk menggali pemahaman bersama, memperkuat kolaborasi dan menghasilkan input dan rekomendasi yang dapat

mendukung perumusan kebijakan maupun langkah tindak lanjut yang lebih efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) adalah untuk menghadirkan ruang dialog yang strategis antar pemangku kepentingan, akademisi, praktisi dan pihak terkait lainnya mengenai posisi BPI Danantara dalam ekosistem pengelolaan BUMN dan perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat kontribusinya.

Secara umum, diskusi ini juga bertujuan menggali informasi, pandangan dan usulan serta solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan tantangan fundamental dalam penatakelolaan BUMN yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan BPI Danantara, mencakup keberlangsungan usaha, kesehatan keuangan, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini.
2. Menganalisis kebutuhan penguatan pada sisi input dan output kinerja BPI Danantara, meliputi kebutuhan strategis untuk memperkuat fondasi operasional dan investasi, serta langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan dampak kinerja usaha.
3. Merumuskan strategi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan usaha sebagai prasyarat untuk

memastikan keberlangsungan dan tata kelola BPI Danantara yang sehat, modern, dan berdaya saing.

1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion (RTD)* “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
 Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Hotel Holiday Inn Bandung, Jawa Barat)



Gambar 1.1 Flyer Kegiatan Round Table Discussion “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan stakeholder terkait mulai dari perwakilan ahli, stakeholder BPI Danantara, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Perwakilan Kepala Daerah dan Dinas
2. Anggota DPRD Jawa Barat
3. Akademisi dan Ekonom Perguruan Tinggi Jawa Barat
4. Asosiasi Bisnis dan Investasi
5. Pelaku Usaha dan Praktisi Ekonomi

1.5 Susunan Acara

Tabel 1.1 Susunan Acara

No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Narasumber/PIC
1	08.30 - 09.00	30	Registrasi Peserta & Penyambutan	Panitia Penyelenggara
2	09.00 - 09.05	5	Pembukaan oleh Master of Ceremony	Nabila Khairunnisa
3	09.05 - 09.10	5	Pembukaan dan Pengantar oleh Direktur Eksekutif	Dr. Akbar Faizal, M.Si
4	09.10 - 09.30	20	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. • Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H
5	09.45 - 10.45	60	Paparan Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Anggito Abimanyu, M.Sc • H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M • Dr. Hendri Satrio, M.Si • Piter Abdullah Redjalam
6	10.45 - 11.50	65	Diskusi Panel & Tanya Jawab	Peserta RTD dan Narasumber
7	11.50 - selesai		Penutupan, Foto Bersama & Makan Siang	

1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Januari				
	Minggu ke-				
	1	2	3	4	
Persiapan Kegiatan					
Pelaksanaan Kegiatan					
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan					

BAB II

LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan sebagai forum petik pendapat strategis untuk mengkaji pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai entitas pengelola konsolidasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta implikasinya terhadap hubungan antara negara, pasar, dan daerah. Diskusi ini berangkat dari kegelisahan atas ketimpangan antara besarnya konsolidasi aset dan investasi nasional dengan terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh daerah, khususnya dalam aspek fiskal, ketenagakerjaan, dan penguatan rantai nilai lokal.

FGD ini mempertemukan pemangku kepentingan pusat dan daerah, akademisi, praktisi kebijakan, pelaku BUMN, serta pemerintah daerah untuk membahas potensi “jepitan” kebijakan, yaitu ketika strategi konsolidasi investasi berskala nasional berisiko melemahkan peran daerah sebagai lokus produksi, penyerapan tenaga kerja, dan basis ekonomi riil. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi kritis atas sejauh mana Danantara mampu berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar kendaraan investasi, dengan memastikan bahwa transformasi tata kelola BUMN berjalan selaras dengan prinsip keadilan fiskal, kemandirian ekonomi daerah, dan tujuan pembangunan nasional yang inklusif.

Peneliti menyoroti Jawa Barat sebagai wilayah yang memiliki kompleksitas tinggi dalam relasi antara konsolidasi aset BUMN dan dinamika ekonomi daerah. Provinsi ini merepresentasikan daerah

penyangga utama pusat ekonomi nasional dengan konsentrasi aktivitas industri dan BUMN yang tinggi, namun di saat yang sama menghadapi tekanan fiskal, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta beban eksternalitas pembangunan yang signifikan. Oleh karena itu, Jawa Barat dipandang relevan sebagai lokus pengujian lanjutan untuk menilai sejauh mana kebijakan Danantara mampu menjawab persoalan distribusi manfaat investasi dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Diskusi menunjukkan bahwa persoalan BUMN dan kebijakan konsolidasi aset tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai rangkaian isu struktural yang saling berkelindan. Isu-isu kunci yang mengemuka mencerminkan tantangan internal BUMN, desain kebijakan konsolidasi melalui Danantara, serta ketegangan peran negara dalam relasinya dengan pasar dan masyarakat, yang secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas BUMN sebagai instrumen pembangunan.

A. Inefisiensi Struktural dan Kinerja BUMN

Diskusi mengungkap bahwa berbagai persoalan struktural masih melekat kuat pada BUMN, mulai dari inefisiensi operasional yang persisten, tumpang tindih rantai nilai antar-BUMN, hingga lemahnya produktivitas tenaga kerja. Praktik tata kelola juga dinilai belum sepenuhnya berbasis meritokrasi dan akuntabilitas kinerja. Paparan riset menunjukkan bahwa meskipun BUMN menguasai aset dalam skala sangat besar, tingkat profitabilitas dan return on asset relatif rendah dan cenderung menurun, sementara beban utang tetap tinggi. Kondisi

ini menimbulkan kekhawatiran bahwa besarnya aset belum diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kinerja yang sepadan.

B. Konsolidasi Aset dan Peran Danantara

Dalam konteks permasalahan tersebut, Danantara diposisikan sebagai upaya konsolidasi aset negara untuk memperbaiki efisiensi pengelolaan, mengurangi fragmentasi antar-BUMN, serta meningkatkan daya ungkit investasi nasional. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan jangka panjang dan menata ulang struktur BUMN agar lebih fokus, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Namun, diskusi juga menegaskan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan mandat, tata kelola, serta disiplin pengelolaan risiko agar konsolidasi tidak sekadar bersifat administratif.

C. Ketegangan Fungsi Komersial dan Penugasan Negara

Isu lain yang mengemuka adalah ketegangan antara fungsi komersial BUMN dan penugasan strategis negara. Sejumlah peserta menyoroti bahwa BUMN kerap dibebani berbagai penugasan publik yang tidak sepenuhnya disertai dengan skema kompensasi fiskal yang jelas dan berkelanjutan. Akibatnya, penugasan tersebut berdampak langsung pada kesehatan keuangan BUMN dan memperlemah kemampuan mereka untuk beroperasi secara efisien dan kompetitif. Diskusi menekankan pentingnya pemisahan yang lebih tegas antara aktivitas komersial dan fungsi pelayanan publik agar beban kebijakan tidak seluruhnya ditanggung oleh BUMN.



D. Relasi Negara, Pasar dan Rakyat

Diskusi juga menyoroti perlunya penataan ulang relasi antara negara, pasar, dan rakyat dalam pengelolaan BUMN. Beberapa peserta mengingatkan bahwa negara tidak seharusnya terjebak pada praktik berbisnis langsung dengan rakyat, namun tetap harus mampu menjalankan peran sebagai agen pembangunan yang efektif. Ketidakseimbangan dalam relasi ini berpotensi menciptakan distorsi pasar, melemahkan daya saing BUMN, serta mengaburkan tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kejelasan peran negara menjadi prasyarat penting agar BUMN dapat berfungsi optimal dalam kerangka ekonomi nasional.

E. Ketimpangan Distribusi Manfaat Ekonomi antara Pusat dan Daerah

Isu ketimpangan pusat-daerah muncul kuat, khususnya dalam konteks daerah dengan konsentrasi BUMN dan aktivitas industri yang tinggi seperti Jawa Barat. Diskusi menyoroti bahwa daerah kerap menanggung beban eksternalitas pembangunan, lingkungan, sosial, dan infrastruktur, tanpa memperoleh manfaat fiskal dan ekonomi yang sepadan. Dividen, pajak, dan nilai tambah ekonomi lebih banyak terserap di tingkat pusat, sementara daerah menghadapi tekanan pembiayaan layanan publik yang meningkat.

F. Tekanan Fiskal Daerah dan Keterbatasan Ruang Kebijakan

Sejalan dengan ketimpangan tersebut, diskusi menggarisbawahi tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Tingginya aktivitas ekonomi dan BUMN tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga ruang kebijakan daerah menjadi terbatas.



Kondisi ini memperlemah kemampuan daerah untuk memanfaatkan investasi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal dan memperdalam ketergantungan pada transfer pusat.

G. Eksternalitas Pembangunan dan Isu Lingkungan

Diskusi menyoroti beban eksternalitas pembangunan yang ditanggung daerah akibat aktivitas BUMN dan proyek skala besar, termasuk degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Isu konservasi versus orientasi profit BUMN, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam, menjadi perhatian utama. Peserta menekankan bahwa biaya eksternalitas tersebut belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perhitungan kinerja dan keuntungan BUMN.

H. Dampak terhadap Ekonomi Riil dan Rantai Nilai Lokal

Sejumlah peserta menyoroti bahwa investasi dan konsolidasi aset BUMN belum secara optimal mendorong penguatan ekonomi riil di daerah. Keterkaitan dengan usaha lokal, UMKM, dan rantai nilai daerah dinilai masih lemah. Akibatnya, kehadiran BUMN berskala besar belum sepenuhnya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

I. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Risiko Konsentrasi Kekuasaan

Diskusi juga mengangkat kekhawatiran terkait tata kelola Danantara dan risiko konsentrasi kekuasaan dalam pengelolaan aset negara. Konsolidasi aset dalam skala besar dinilai memerlukan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah moral hazard, intervensi politik, dan pengambilan

risiko berlebihan. Tanpa tata kelola yang kokoh, konsolidasi berpotensi memperbesar risiko sistemik.

2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting

Bagian ini merangkum beragam pandangan, kritik, dan perdebatan substantif yang muncul dalam diskusi, yang mencerminkan perbedaan cara pandang atas desain, tujuan, serta implikasi kebijakan Danantara dan reformasi BUMN. Ragam pandangan ini memperlihatkan bahwa konsensus belum sepenuhnya terbentuk, baik di tingkat konseptual, operasional, maupun normatif.

A. Danantara sebagai **Game Changer** vs Risiko Harapan

Berlebihan

Sebagian pembicara memandang Danantara sebagai *game changer* strategis untuk mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsolidasi aset negara dan peningkatan kapasitas investasi. Dalam perspektif ini, Danantara dilihat bukan sekadar instrumen penyehatan BUMN, melainkan *investment vehicle* jangka panjang yang ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga target ambisius (misalnya pertumbuhan 8%).

Namun, pandangan ini berhadapan dengan sikap lebih skeptis yang menekankan bahwa Danantara adalah “raksasa yang baru dibangun”, memiliki aset besar, tetapi masih rapuh secara institusional dan belum siap menghasilkan dampak cepat. Kekhawatiran utama adalah ekspektasi publik dan politik yang terlalu tinggi dalam jangka pendek, sementara secara alamiah investasi

berskala besar membutuhkan waktu panjang sebelum menghasilkan return yang nyata.

B. Konsolidasi Aset Nasional vs Ketahanan Fiskal Jangka Pendek

Perdebatan penting muncul terkait implikasi fiskal dari konsolidasi aset BUMN ke dalam Danantara. Di satu sisi, konsolidasi dipandang mampu meningkatkan leverage aset negara dan menarik investasi global. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai kebutuhan jangka pendek, seperti subsidi, transfer ke daerah, dan belanja sosial.

Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan antara orientasi jangka panjang (akumulasi aset dan investasi) dan kebutuhan jangka pendek (stabilitas fiskal dan pembiayaan APBN), yang hingga kini belum memiliki formula penyeimbang yang disepakati bersama.

C. Sentralisasi Investasi vs Keadilan Distribusi ke Daerah

Banyak peserta mengangkat pertanyaan mendasar: sejauh mana Danantara akan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Di satu sisi, Danantara dipahami sebagai instrumen nasional yang wajar jika dikelola secara terpusat demi efisiensi dan daya saing global. Namun di sisi lain, daerah, terutama yang menjadi lokasi operasional BUMN, menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka hanya menanggung dampak eksternalitas (lingkungan, sosial, fiskal), tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.

Perdebatan ini mencuat dalam bentuk kritik terhadap sistem perpajakan dan bagi hasil yang masih sangat tersentralisasi, sehingga

keuntungan ekonomi dari aktivitas BUMN dan Danantara lebih banyak “berhenti” di pusat, sementara daerah hanya menjadi ruang produksi.

D. Fungsi Investasi Strategis vs Penyehatan Operasional BUMN

Diskusi juga memperlihatkan perbedaan penekanan antara dua fungsi besar Danantara: sebagai pengelola investasi strategis dan sebagai instrumen restrukturisasi BUMN. Sebagian pihak menilai Danantara sebaiknya fokus pada fungsi investasi berskala besar dan berorientasi global, sementara penyehatan BUMN tetap menjadi urusan internal korporasi.

Sebaliknya, pandangan lain menekankan bahwa kegagalan penyehatan BUMN justru akan membebani Danantara, karena aset yang dikonsolidasikan berasal dari entitas yang secara operasional belum sehat. Perdebatan ini menunjukkan belum tuntasnya kesepakatan mengenai prioritas dan urutan agenda reformasi.

E. Profesionalisme Korporasi vs Intervensi Politik

Isu klasik tetapi krusial kembali mengemuka: sejauh mana pengelolaan BUMN dan Danantara dapat benar-benar dilepaskan dari intervensi politik. Sejumlah pembicara menilai bahwa selama BUMN masih menjadi arena kompromi politik, termasuk dalam penunjukan direksi dan komisaris, maka reformasi kelembagaan apa pun akan berisiko berhenti di permukaan.

Di sisi lain, ada pandangan realistis yang mengakui bahwa BUMN tidak mungkin sepenuhnya steril dari politik, sehingga yang lebih penting adalah membangun pagar pembatas yang jelas agar intervensi politik tidak merusak kinerja korporasi.



F. Orientasi Profit vs Fungsi Konservasi dan Kepentingan Publik

Perdebatan tajam muncul terkait pengelolaan BUMN di sektor sumber daya alam dan lingkungan. Sebagian peserta menilai bahwa tidak semua BUMN layak dipaksa mengejar profit, terutama yang berperan penting dalam konservasi lingkungan dan ketahanan ekologis. Dalam pandangan ini, pemaksaan orientasi laba justru menciptakan biaya sosial dan fiskal yang lebih besar, seperti bencana lingkungan dan beban pemulihan.

Sebaliknya, pandangan lain mengingatkan bahwa tanpa disiplin finansial, BUMN berisiko menjadi beban permanen negara. Perdebatan ini menegaskan perlunya diferensiasi yang tegas antara entitas yang berorientasi bisnis dan entitas yang menjalankan fungsi konservasi atau pelayanan publik.

G. Legalitas dan Kepastian Hukum vs Fleksibilitas Kebijakan

Dari sisi hukum, muncul perdebatan mengenai dasar legal Danantara dan implikasinya terhadap status kerugian BUMN, posisi direksi, serta hubungan dengan rezim hukum lain seperti hukum perseroan dan persaingan usaha. Sebagian akademisi menilai perlunya audit dan harmonisasi hukum agar Danantara tidak menimbulkan ketidakpastian dan risiko hukum di masa depan.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa fleksibilitas kebijakan justru dibutuhkan agar Danantara dapat bergerak cepat dan tidak terjebak dalam rigiditas regulasi lama. Ketegangan antara kepastian hukum dan kelincahan kebijakan menjadi salah satu perdebatan normatif yang belum sepenuhnya terjawab.



H. Optimisme Transformasi vs Realisme Kompleksitas Implementasi

Secara umum, diskusi memperlihatkan tarik-menarik antara optimisme terhadap visi besar transformasi Danantara dan kesadaran realistis akan kompleksitas implementasi di lapangan. Hampir semua peserta sepakat bahwa niat reformasi ini penting dan relevan, tetapi juga mengakui bahwa tanpa pembenahan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kejelasan distribusi manfaat, Danantara berisiko menjadi perubahan struktural tanpa dampak substantif.

2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah

Bagian ini menangkap secara spesifik bagaimana daerah memandang Danantara dan BUMN: bukan sebagai konsep nasional abstrak, melainkan sebagai entitas yang berdampak langsung pada fiskal daerah, struktur ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif daerah dalam diskusi tidak homogen, tetapi memperlihatkan pola persoalan yang konsisten lintas wilayah.

A. Ketimpangan Manfaat antara Lokasi Operasi dan Distribusi Fiskal

Daerah menyoroti ketidakseimbangan antara kehadiran fisik dan ekonomi BUMN di wilayah mereka dengan manfaat fiskal yang diterima daerah. Banyak BUMN beroperasi, menggunakan lahan, tenaga kerja, dan infrastruktur daerah, namun kontribusi pajak utama, termasuk PPh karyawan dan pajak korporasi, terkonsentrasi di pusat karena kantor pusat berada di Jakarta.

Akibatnya, daerah menanggung beban eksternalitas pembangunan (lingkungan, sosial, infrastruktur), sementara nilai

tambah fiskal tidak kembali secara proporsional. Situasi ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem fiskal nasional.

B. BUMN sebagai Beban Finansial bagi Daerah

Diskusi mengungkap bahwa di sejumlah daerah, BUMN justru menjadi beban keuangan langsung, khususnya melalui pinjaman kepada BUMD atau bank daerah yang tidak dilunasi secara memadai.

Kasus Jawa Barat menonjol, di mana akumulasi utang BUMN kepada Bank Pembangunan Daerah menekan kesehatan keuangan daerah dan berpotensi mengganggu fungsi intermediasi perbankan lokal. Dari sudut pandang daerah, relasi ini mencerminkan asimetrinya posisi tawar daerah terhadap BUMN besar, tanpa mekanisme perlindungan yang efektif.

C. Lemahnya Keterkaitan Investasi Nasional dengan Kebutuhan Lokal

Daerah menilai bahwa investasi berskala besar, baik melalui BUMN maupun Danantara, sering kali tidak terhubung secara langsung dengan potensi, kebutuhan, dan struktur ekonomi lokal.

Proyek strategis nasional dinilai terlalu berorientasi pada agregat makro (nilai investasi, skala proyek), namun minim integrasi dengan rantai nilai daerah, UMKM lokal, dan penciptaan kesempatan kerja berbasis wilayah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa Danantara berpotensi menjadi instrumen investasi yang “melewati” daerah, bukan “mengakar” di daerah.

D. Risiko Crowding Out terhadap Ekonomi Daerah

Sejumlah peserta mengingatkan risiko bahwa kehadiran BUMN yang terlalu dominan, dengan dukungan regulasi dan pembiayaan negara, dapat menggeser atau mematikan usaha swasta lokal.

Dari perspektif daerah, BUMN seharusnya berfungsi sebagai katalis (*crowding in*), bukan pesaing yang memanfaatkan keunggulan struktural untuk menguasai pasar lokal. Tanpa batasan peran yang jelas, Danantara dikhawatirkan memperkuat kecenderungan ini melalui konsolidasi aset dan pembiayaan skala besar.

E. Ketegangan antara Orientasi Profit dan Fungsi Konservasi Wilayah

Diskusi daerah, khususnya Jawa Barat, menekankan konflik antara logika profit BUMN dan fungsi ekologis wilayah.

BUMN perkebunan dan kehutanan dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan (air, hutan, tanah), namun tekanan target setoran dan laba justru mendorong eksploitasi berlebihan yang berujung pada bencana ekologis dan biaya pemulihan yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah.

Daerah mengusulkan pemisahan tegas antara aset yang layak dikelola secara bisnis dan aset yang seharusnya dialihkan ke rezim konservasi, agar beban lingkungan tidak terus disubsidi oleh APBD dan APBN.

F. Ketidaksiapan Kelembagaan Daerah dalam Relasi dengan Danantara

Daerah mengakui adanya keterbatasan kapasitas institusional untuk bernegosiasi, merancang proyek, dan menjaga kepentingan

daerah dalam skema investasi Danantara. Tanpa mekanisme formal yang menjamin keterlibatan daerah sejak tahap perencanaan, posisi daerah berisiko sekadar menjadi lokasi proyek, bukan mitra strategis. Hal ini memperkuat tuntutan agar Danantara memiliki mandat eksplisit terkait dampak regional dan skema kemitraan dengan BUMD, BUMDes, dan koperasi lokal.

G. Harapan terhadap Danantara sebagai Instrumen Pemerataan

Di tengah kritik, daerah tetap melihat Danantara sebagai peluang strategis apabila dikelola dengan desain yang tepat. Harapan utama daerah mencakup: keterlibatan daerah dalam kepemilikan atau manfaat ekonomi proyek strategis, distribusi manfaat investasi yang lebih adil lintas wilayah, dan penguatan peran daerah dalam pembangunan jangka panjang. Namun harapan ini bersyarat: tanpa reformasi tata kelola, fiskal, dan relasi pusat-daerah, Danantara berpotensi mereproduksi masalah lama dalam skala yang lebih besar.

2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi

Peluang kebijakan Danantara bersifat besar dan strategis, namun risikonya juga sistemik. Tanpa kejelasan mandat, tata kelola yang ketat, serta desain relasi pusat-daerah yang adil, Danantara berpotensi menjadi konsolidasi aset tanpa konsolidasi manfaat. Sebaliknya, jika peluang ini dimanfaatkan dengan disiplin kebijakan dan keberanian reformasi, Danantara dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional yang sesungguhnya.



A. Peluang Kebijakan

1) Konsolidasi Aset Nasional sebagai Pengungkit Investasi Jangka Panjang.

Danantara membuka peluang konsolidasi aset BUMN dalam skala besar sebagai investment vehicle nasional. Dengan basis aset mendekati satu triliun dolar, Danantara berpotensi meningkatkan leverage investasi, menarik co-investment global, dan membiayai proyek strategis yang selama ini tidak terjangkau oleh APBN maupun swasta murni, terutama di sektor energi terbarukan, infrastruktur, pangan, dan industri hilir.

2) Reorientasi BUMN dari Beban Fiskal menjadi Sumber Pertumbuhan.

Melalui pemisahan fungsi investasi dan restrukturisasi, Danantara memberi peluang untuk menata ulang BUMN yang selama ini menjadi beban fiskal akibat inefisiensi, tumpang tindih bisnis, dan penugasan yang tidak dikompensasi. Jika berhasil, BUMN dapat direposisi sebagai entitas produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penampung kebijakan.

3) Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah.

Danantara berpotensi menjadi anchor investor bagi proyek-proyek daerah, khususnya di wilayah dengan aset strategis tetapi keterbatasan pembiayaan. Daerah dapat mengusulkan proyek investasi berbasis potensi lokal, energi, pangan, industri pengolahan, logistik, yang kemudian dikemas secara bankable untuk ditawarkan kepada Danantara dan mitra global.

4) Penguatan Hilirisasi dan Ketahanan Nasional.





Konsolidasi aset memungkinkan Danantara mendukung agenda hilirisasi dan ketahanan nasional secara lebih terintegrasi, mulai dari pangan, energi, hingga mineral. Hal ini membuka peluang pengurangan ketergantungan impor, penguatan rantai pasok domestik, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan pasar jangka panjang.

5) Penataan Relasi Pusat-Daerah melalui Skema Investasi Baru.

Diskusi membuka peluang desain ulang relasi fiskal dan ekonomi pusat-daerah, misalnya melalui kepemilikan saham daerah, BUMD, atau koperasi lokal dalam proyek nasional (seperti infrastruktur strategis). Skema ini berpotensi meningkatkan rasa memiliki daerah terhadap proyek nasional sekaligus memperluas distribusi manfaat ekonomi.

6) Reformasi Tata Kelola dan Profesionalisasi Pengelolaan Aset Negara.

Momentum pembentukan Danantara dapat dimanfaatkan untuk mendorong reformasi tata kelola BUMN secara lebih konsisten, termasuk meritokrasi dalam pengangkatan direksi dan komisaris, penguatan manajemen risiko, serta disiplin korporasi yang lebih ketat. Jika dijalankan serius, ini menjadi titik balik profesionalisasi pengelolaan aset negara.

B. Risiko Operasional, Tata Kelola dan Fiskal

Tanpa mekanisme distribusi yang jelas, Danantara berisiko memperkuat sentralisasi manfaat ekonomi di tingkat pusat. Daerah dengan konsentrasi BUMN tinggi dapat tetap menanggung eksternalitas (lingkungan, sosial, fiskal), sementara manfaat fiskal dan



ekonomi utama terkonsentrasi di Jakarta atau pusat pengambilan keputusan.

1) Tekanan terhadap Ketahanan Fiskal Jangka Pendek.

Pengalihan dividen BUMN ke Danantara berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah pusat dalam jangka pendek, terutama untuk pembiayaan subsidi, transfer ke daerah, dan program prioritas sosial. Tanpa strategi transisi yang jelas, risiko ketegangan antara kebutuhan fiskal tahunan dan orientasi investasi jangka panjang akan meningkat.

2) Ketidakpastian Hukum dan Harmonisasi Regulasi.

Pembentukan Danantara membawa implikasi hukum kompleks, termasuk status kerugian BUMN, posisi direksi sebagai penyelenggara negara, serta potensi konflik dengan regulasi persaingan usaha dan anti-monopoli. Tanpa audit harmonisasi hukum yang komprehensif, risiko sengketa hukum dan ketidakpastian investasi akan membayangi operasional Danantara.

3) Moral Hazard dan Reproduksi Praktik Lama.

Jika tidak disertai perubahan tata kelola yang nyata, Danantara berisiko mereproduksi praktik lama BUMN: intervensi politik, penempatan non-profesional, dan pengambilan keputusan yang tidak berbasis kinerja. Skala aset yang besar justru dapat memperbesar dampak kesalahan tata kelola.

4) Risiko Crowding Out terhadap Usaha Swasta dan Lokal.

Dominasi Danantara dan BUMN dalam proyek-proyek strategis berpotensi menekan peran swasta dan pelaku usaha lokal jika tidak dirancang sebagai crowding in. Tanpa batas yang jelas, intervensi

negara dapat mengkanibal pasar, melemahkan kewirausahaan daerah, dan menciptakan ketergantungan baru.

5) Risiko Lingkungan dan Eksternalitas Jangka Panjang.

Dorongan profit dan target setoran berpotensi mendorong eksploitasi aset alam tanpa perhitungan biaya lingkungan jangka panjang. Diskusi menegaskan bahwa kegagalan memisahkan fungsi bisnis dan konservasi dapat memicu bencana ekologis yang pada akhirnya membebani fiskal negara dan daerah secara jauh lebih besar.

6) Keterbatasan Likuiditas dan Kedalaman Pasar Keuangan.

Upaya leverage aset Danantara menghadapi risiko struktural berupa dangkalnya pasar keuangan domestik dan keterbatasan likuiditas. Ketergantungan pada penerbitan surat utang atau skema pembiayaan tertentu berisiko meningkatkan beban keuangan jika tidak diimbangi arus investasi riil yang kuat.

2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Diskusi lintas daerah menegaskan bahwa pembentukan Danantara membuka peluang kebijakan strategis yang signifikan bagi pemerintah pusat untuk melakukan lompatan institusional dalam pengelolaan aset negara. Konsolidasi aset BUMN memberi ruang untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan jangka panjang, meningkatkan daya ungkit investasi nasional, serta menarik mitra global melalui skema leverage yang selama ini sulit dilakukan oleh BUMN secara terfragmentasi. Dalam perspektif ini, Danantara berpotensi menjadi instrumen katalitik untuk mendukung agenda pertumbuhan

ekonomi tinggi, termasuk hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, infrastruktur strategis, serta penguatan sektor manufaktur dan teknologi.

Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat secara tegas menata ulang arsitektur kebijakan yang menghubungkan pusat dan daerah. Diskusi menunjukkan perlunya reformasi mekanisme distribusi manfaat ekonomi, khususnya melalui penataan ulang sistem perpajakan, lokasi badan usaha, dan basis fiskal BUMN agar daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung tidak terus-menerus menanggung eksternalitas tanpa memperoleh imbal balik yang adil. Dalam konteks ini, kebijakan pusat perlu mendorong agar entitas usaha yang beroperasi di daerah juga memberikan kontribusi fiskal dan ekonomi langsung kepada wilayah tersebut, baik melalui pajak, penciptaan lapangan kerja, maupun kemitraan dengan BUMD, BUMDes, dan koperasi lokal.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat menghadapi risiko kebijakan yang tidak kecil. Konsolidasi aset dalam skala sangat besar berpotensi memusatkan pengambilan keputusan investasi pada level nasional tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal. Jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan distribusi, Danantara justru dapat memperdalam ketimpangan antarwilayah dan memperkuat persepsi bahwa investasi nasional bersifat elitis dan terlepas dari kebutuhan daerah. Risiko lain yang mengemuka adalah ketegangan antara fungsi investasi jangka panjang Danantara dan kebutuhan fiskal jangka pendek negara, terutama ketika dividen BUMN dialihkan ke skema

investasi sementara APBN masih menanggung beban subsidi, PSO, dan pembiayaan pembangunan dasar.

Diskusi juga menyoroti risiko tata kelola dan hukum yang perlu diantisipasi secara serius. Ketidakjelasan harmonisasi regulasi, terutama terkait status kerugian BUMN, kewenangan direksi, serta hubungan Danantara dengan rezim persaingan usaha dan hukum antimonopoli, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru melemahkan kepercayaan investor. Tanpa audit hukum yang sistematis dan mekanisme pengawasan yang independen, konsolidasi aset berisiko berubah menjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi tanpa akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa transformasi kelembagaan ini disertai dengan kejelasan mandat, pembagian kewenangan yang tegas, serta sistem pengawasan yang tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek.

2.7 Kesimpulan

Diskusi “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” memperlihatkan bahwa Danantara merupakan proyek transformasi besar yang lahir dari kesadaran atas kegagalan struktural pengelolaan BUMN selama ini. Ia bukan sekadar instrumen penyehatan korporasi negara, melainkan upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, diskusi juga menegaskan bahwa besarnya skala dan ambisi Danantara justru

menempatkannya pada medan risiko yang kompleks, baik dari sisi ekonomi, fiskal, tata kelola, hukum, maupun politik.

Salah satu benang merah utama adalah kesenjangan antara pusat dan daerah. Daerah, khususnya wilayah dengan konsentrasi aset dan aktivitas BUMN tinggi seperti Jawa Barat, menghadapi paradoks pembangunan: menjadi penyangga utama ekonomi nasional tetapi tidak selalu menikmati manfaat ekonomi yang sepadan. Tanpa penataan ulang relasi fiskal, kelembagaan, dan distribusi manfaat, Danantara berisiko memperkuat pola ekstraksi nilai dari daerah ke pusat, alih-alih menjadi instrumen pemerataan pembangunan.

Diskusi juga menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak dapat dilepaskan dari pembenahan fundamental BUMN itu sendiri. Konsolidasi aset tidak otomatis menyelesaikan persoalan inefisiensi, politisasi jabatan, lemahnya produktivitas, dan ketidakjelasan penugasan negara. Tanpa pemisahan yang tegas antara fungsi bisnis, fungsi pelayanan publik, dan fungsi konservasi, BUMN, meskipun berada di bawah payung Danantara, akan terus menanggung beban kebijakan yang tidak rasional secara ekonomi dan berisiko menciptakan kerugian jangka panjang bagi negara.

Akhirnya, diskusi menempatkan Danantara sebagai sebuah harapan sekaligus ujian. Ia menawarkan peluang untuk mengubah cara negara mengelola kekayaan dan pembangunan, tetapi juga membuka ruang kegagalan jika dijalankan tanpa disiplin tata kelola, kejelasan tujuan, dan keberpihakan yang adil terhadap daerah dan rakyat. Dengan demikian, masa depan Danantara tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, melainkan oleh keberanian politik dan

kapasitas institusional pemerintah untuk menata ulang relasi negara, pasar, dan rakyat secara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.









BAB III

DOKUMENTASI KEGIATAN

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan

<p>1. Registrasi Peserta & Penyambutan</p>  <p>Gambar 3.1 Registrasi Peserta</p>	 <p>Gambar 3.2 Registrasi Peserta</p>
<p>2. Pembukaan Acara oleh MC</p>  <p>Gambar 3.3 Pembukaan Acara oleh MC Nabila Khoirunnisa</p>	 <p>Gambar 3.4 Pembukaan Acara oleh MC Nabila Khoirunnisa</p>
<p>3. Pembukaan oleh Host</p>  <p>Gambar 3.5 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>	 <p>Gambar 3.6 Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>



4. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti
Nagara Institute



Gambar 3.7 Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 3.8 Pemaparan Hasil Riset oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H

5. Pemaparan oleh Narasumber



Gambar 3.9 Pemaparan dari Prof. Anggito Abimanyu, [M.Sc](#) - Ketua Dewan Komisiner LPS



Gambar 3.10 Pemaparan dari H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M - Gubernur Jawa Barat



Gambar 3.11 Pemaparan dari Piter Abdullah Redjalam - Direktur Program Kebijakan Center for Policy Prasasti



Gambar 3.12 Pemaparan dari Hendri Satrio - Founder Lembaga Survei KedaiKOPI

6. Diskusi Panel dan Tanya Jawab



Gambar 3.13 Tanggapan dari Mohamad Sidkon Dj, S.H - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat



Gambar 3.14 Tanggapan dari Prof. Dr. Cecep Darmawan, [S.Pd.](#), [S.IP.](#), S.H., M.H., [M.Si](#) - Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia



Gambar 3.15 Tanggapan dari Albert Simangunsong - Komisioner PT PP



Gambar 3.16 Tanggapan dari Prof. Tarsisius Muwarji, S.H., M.H - Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Padjadjaran



Gambar 3.17 Tanggapan dari Mohamad Dian Revindo, Ph.D



7. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Kegiatan



Gambar 3.18 Foto Bersama Peneliti dan Narasumber





BAB IV

PENUTUP

Kegiatan *Round Table Discussion* telah terlaksana dengan baik dan memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan kebijakan reformasi Badan Usaha Milik Negara. Diskusi yang diselenggarakan di Bandung ini, dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku bisnis, memperkaya perspektif mengenai jepitan problem investasi yang terjadi dari sudut pandang pusat maupun daerah khususnya dalam menghadapi paradoks pembangunan dimana Jawa Barat menjadi penyangga utama ekonomi nasional tetapi tidak selalu menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

Harapan terhadap peningkatan kapasitas investasi, efisiensi pengelolaan aset publik, dan pembiayaan pembangunan jangka panjang hanya dapat diwujudkan apabila diimbangi dengan tata kelola yang kredibel, kehati-hatian fiskal, serta pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis dan penugasan negara. Diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan agar transformasi di tingkat pusat mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkeadilan hingga ke daerah. Dengan demikian, masa depan Danantara akan sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam menegakkan prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan disiplin kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang dirangkum dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan reformasi





BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah daerah serta sinergi antara BUMN dan pelaku usaha daerah perlu terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai penutup, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai rujukan dalam proses pengambilan kebijakan ke depan. Diharapkan kegiatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan reformasi BUMN serta mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah.



DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Hadir Kegiatan
- Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
- Laporan Amplifikasi Media Sosial
- Materi Kegiatan